

Siaran Pers

BONUS DEMOGRAFI 2030-2040: STRATEGI INDONESIA TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN

JAKARTA (22/5) – Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Untuk itu, melalui kerangka kerja inisiatif *Reverse Linkage*, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* melaksanakan *Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skills Development Strategy Formulation* di Hotel Pullman, Jakarta, pada 22-24 Mei 2017. “Lokakarya ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dari OECD, IsDB maupun antar negara peserta dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan keterampilan, khususnya terkait sumber daya manusia sebagai aset atau *human capital*, hingga kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Peserta lokakarya berasal dari sejumlah negara, baik dari negara maju maupun berkembang, di antaranya Algeria, Jordan, Tunisia, Kazakhstan, Senegal, Togo, Korea, Norwegia, Portugal, Mesir, Maroko dan Malaysia. Dalam *Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skills Development Strategy Formulation* tersebut, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan turut hadir untuk menyampaikan materi tentang arah kebijakan, tantangan, prioritas, serta implementasi program/kegiatan terkait strategi pengembangan keterampilan. Untuk diketahui, saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. *Pertama*, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah. *Kedua*, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia fokus pada dua isu, yakni tenaga kerja dan pendidikan. Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lima strategi utama. *Pertama*, harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar. *Kedua*, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. *Ketiga*, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. *Keempat*, perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor dengan produktivitas tinggi.

“Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas,” ungkap Menteri Bambang. Tenaga terampil di Indonesia berasal dari pendidikan formal, yakni melalui pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik) dan pendidikan non formal, yaitu melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan layanan kursus dan pelatihan. Jalur non formal diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan revitalisasi

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tujuan utama penambahan lulusan dan peningkatan kualitas anak didik. Kesesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian utama dalam strategi revitalisasi SMK. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong industri agar terus meningkatkan keterampilan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan.

Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skills Development Strategy Formulation diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan keterampilan nasional (*national skills*). Lokakarya tersebut juga dibidik untuk merekomendasikan mekanisme kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi pengembangan keterampilan, salah satunya melalui pengembangan *roadmap* strategi pembangunan keterampilan nasional. Pelaksanaan lokakarya juga berperan sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya Gol No. 4 “*to ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning*”, dan Gol No. 8 “*to promote sustain and inclusive economic growth, full and productive employment and decent work for all*”. “Saya berharap lokakarya ini dapat menghasilkan dialog konkret dan konstruktif tentang bagaimana Indonesia dapat lebih efektif dalam berkontribusi terhadap pembangunan serta membahas skema kerja sama yang optimal untuk mengisi jurang pengetahuan terkait strategi pembangunan keterampilan,” pungkask Menteri Bambang.

Jakarta, 22 Mei 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id